

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau yang dikenal dengan sebutan PUAP adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian. Program PUAP ditujukan untuk menumbuhkan aktivitas dan gairah di bidang pertanian. Implementasi PUAP di berbagai daerah tidaklah sama. Beberapa penelitian tentang PUAP di daerah lain menunjukkan adanya hasil yang bermacam-macam. Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Siregar dkk mengatakan terdapat perbedaan kenaikan penghasilan petani setelah menerima dana PUAP<sup>1</sup>. Hal senada juga diiyakan oleh Gilberto dkk, pendapatan rata-rata para petani sebelum mendapat dana PUAP adalah sekitar Rp 746.000,-/ bulan dan pendapatan sesudah mendapatkan dana dari PUAP yaitu menjadi Rp 800.900,-/ bulan. Dengan begitu rata-rata pendapatan yang diperoleh para anggota tani Gapoktan Wahana Asri meningkat Rp 55.000,-/ bulan<sup>2</sup>.

Hasil lain tentang dampak PUAP di Kabupaten Bogor menunjukkan hasil yang positif, yaitu Gapoktan telah mampu mengelola dana ini PUAP dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah anggota Gapoktan yang menerima dana PUAP kian bertambah. Begitu juga dengan Sisa Hasil Usaha pengelolaan dana PUAP mengalami kenaikan. Faktor lain dari keberhasilan penerapan PUAP

---

<sup>1</sup> Siregar, Sasmita, dkk, 2013, *Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan PeTANI*, Jurnal Agrium, April 2013 Volume 18 No 1

<sup>2</sup> Zanzas, Gilberto Frofika, dkk, 2015, *Analisis Efektivitas Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) serta Dampaknya Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Wahana Sari)*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Volume 3 Tahun 2015

ini adalah kredit simpan pinjam dari dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan. berjalan lancar, tidak mengalami penunggakan. Sehingga ini memudahkan proses pinjam meminjam dana bagi para petani-petani dan anggota lain<sup>3</sup>.

Apabila program PUAP mampu diimplementasikan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat, maka dampaknya sudah jelas akan mereka rasakan sendiri. Sebagaimana yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat<sup>4</sup>. Penerapan PUAP di sana sudah berjalan dengan sangat lancar dan efektif. Keefektifan ini dapat diukur melalui mudahnya prosedur peminjaman dana, ketepatan waktu pembayaran atau pengembalian dana pinjaman (angsuran), serta bunga pinjaman dari dana PUAP yang relatif rendah dan terjangkau. Begitu pula Sumber Daya Manusia Gapoktan yang cukup mumpuni dalam mengelola dana PUAP yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para petani.

Program PUAP tidak selamanya dapat memberikan dampak dan pengaruh positif kepada para petani. Di beberapa daerah penelitian lain justru menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu program PUAP memiliki hasil negatif. Dengan kata lain PUAP tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan maupun hasil produksi pertanian. Seperti halnya implementasi PUAP yang berada pada Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi<sup>5</sup>. Apabila dilihat dari segi

---

<sup>3</sup> Angriani, Triane Widya, 2012, *Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor*, Tesis. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

<sup>4</sup> Al Fanny, Meydi Tia, 2017, *Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Sayur (Desa Watas Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

<sup>5</sup> Lasmini, Fuji, 2010, *Analisis Keragaan Dan Pengaruh Penyaluran Dana Puap Pada Gapoktan Subur Rejeki Dengan Pengelolaan Dana Berbasis Syariah*, Skripsi. Institut Pertanian Bogor

analisa regresi fungsi produktivitas, PUAP belum mampu memberikan pengaruh terhadap produktivitas padi. Hal ini disebabkan bahwasanya para petani penerima PUAP dan non penerima PUAP tidak mau berusaha untuk mengubah penggunaan faktor produksi. Mereka para petani penerima dana PUAP ternyata lebih banyak menggunakan tenaga kerja atau buruh tani di dalam produksi usaha pertanian. Oleh sebab itu pengeluaran untuk biaya total bertani semakin besar. Atau bisa dikatakan pendapatan petani yang diperoleh tadinya semakin berkurang karena adanya pembiayaan kepada upah tenaga kerja.

Permasalahan PUAP memang masih selalu saja terjadi di berbagai tempat lain. Kejadian yang serupa berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Implementasi program PUAP yang lebih tepatnya berada pada Kecamatan Bungaraya belum menunjukkan adanya suatu tanda-tanda dari keberhasilan<sup>6</sup>. Hambatan terhadap PUAP masih terjadi seperti adanya penunggakan dana atau pengembalian dana pinjaman PUAP kepada pengurus Gapoktan. Akibatnya dana PUAP mengalami kemacetan untuk pencairan terhadap petani lain yang belum sempat mendapatkan dana PUAP. Selain itu kejadian penunggakan pinjaman PUAP diperburuk dengan produktivitas hasil tanaman tani menurun, adanya orang yang melarikan diri dan membawa dana pinjaman PUAP dan penggunaan PUAP yang tidak tepat sasaran.

Ketidakberhasilan program PUAP pun juga terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau<sup>7</sup>. Penerapan program PUAP tidak sesuai dengan tujuan awal mengapa bantuan tersebut ada. Masyarakat masih belum memahami untuk

---

<sup>6</sup> Nursyaifullah, 2015, *Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak*, JOM FISIP Nomor 2 Volume 2 Oktober 2015

<sup>7</sup> Pratiwi, Siska Dian, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Desa Sikijang Kecamatan Logos Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*, JOM FISIP Volume 4 No 1 – Februari 2017

apa sebenarnya dana PUAP diberikan kepada mereka. Sebagai akibatnya dana PUAP yang dipinjam tidak digunakan untuk kepentingan usaha tani, melainkan dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti untuk mendirikan bangunan rumah, membayarkan kredit maupun membeli motor. Alhasil keuntungan (laba) dari hasil bertani dan berkebun secara langsung mengalami penurunan.

Pengawasan program, kontrol dan evaluasi harus selalu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga agar terjadi perbaikan-perbaikan di semua sektor lini. Kebijakan PUAP memang perlu diberikan mengingat negara kita merupakan negara yang kaya akan keragamannya, termasuk dari ragam Sumber Daya Alam pertanian. Tidak heran apabila kemudian Indonesia disebut sebagai negara agraris.<sup>8</sup>

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian tergolong besar. Dengan rincian luas sawah mencapai 8,2 juta Ha, perkebunan (*dri field* atau *garden*) 11,90 juta Ha dan ladang (*shifting cultivation*) luasnya 5,2 juta Ha serta lahan lain yang tidak produktif dan ada juga yang belum termanfaatkan<sup>9</sup>. Luasnya lahan adalah potensi yang harus digunakan dengan baik oleh pemerintah maupun para petani untuk mewujudkan pembangunan di bidang pertanian agar ekonomi masyarakat kuat. Begitu pula dengan kualitas pertanian Indonesia yang perlu ditingkatkan. Segala permasalahan atau pun problematika di bidang pertanian harus segera diatasi dan diselesaikan.

---

<sup>8</sup> Negara agraris adalah negara dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, termasuk lahannya yang sebagian besar dimanfaatkan untuk produksi di bidang pertanian (Ulfa, Faissatun, 2015, *Fluktuasi Pertanian Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2004-2009*, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*. Volume 3, No. 3, Oktober 2015

<sup>9</sup> Anonymous, 2015, *Luas Penggunaan Lahan di Indonesia 2008-2012*. <https://bapenas.go.id/download.php?id=1869>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018

Akan tetapi keterbatasan akan modal serta lemahnya lembaga pertanian menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh petani. Modal dibutuhkan oleh petani dalam membantu menekan biaya produksi dan keperluan lain dalam bertani. Laba untuk modal yang didapatkan dari hasil panen selama masih kurang, sehingga keuntungan yang diperoleh hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya bantuan modal dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh petani agar dapat memudahkan proses usaha tani serta melakukan produksi agribisnis lainnya yang dapat dikerjakan.

Di dalam perkembangan dinamika pemerintahan, usaha untuk membantu para petani yang kesulitan modal sebenarnya sudah dilakukan dengan bermacam cara dan dengan berbagai jenis bantuan. Terhitung mulai tahun 1967 Pemerintah telah membuat program BIMAS (Bimbingan Masal)<sup>10</sup>, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP) atau BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat), PMUK (Penguatan Modal Usaha Kelompok, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K&NK), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan sekarang adalah PUAP.

Bantuan yang diberikan tergantung sesuai dengan inisiatif dari Pemerintah yang menjabat. Terkadang kebijakan yang ada berganti bukan dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat, namun karena politisasi kebijakan yang kerap terjadi. Maka untuk mengukur kegagalan maupun keberhasilan program Pengembangan

---

<sup>10</sup> BIMAS (Bimbingan Masal) adalah program yang digagas oleh pemerintah pusat yang bertujuan dalam mengupayakan Indonesia agar dapat berswasembada beras. Anonymous. 2015. *Program Intensifikasi Pertanian Revolusi Hijau*. <http://www.omtani.com/2015/03/program-intensifikasi-pertanian-revolusi-hijau.html>. Diakses tanggal 4 Mei 2018.

Usaha Agribisnis Perdesaan perlu diadakan suatu penelitian yang mengarah kepada proses evaluasi. Evaluasi berguna untuk memberikan penilaian khususnya kepada para *stake holder* (pemangku kepenatan) dan atau pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Dari tahun 2008 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan kepada para petani berupa dana yang disalurkan melalui rekening Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)<sup>11</sup>. Bantuan tersebut berupa program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang berbentuk pinjaman modal bagi petani. PUAP menjadi bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)<sup>12</sup> yang telah dimulai sejak tahun 2008. Di dalam mekanisme pelaksanaannya, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 545/Kpts/OT.160/9/2007 dan Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum PUAP yang diperbarui dengan Permentan Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

Salah satu daerah yang juga mendapatkan kucuran bantuan dana tersebut adalah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan secara rata-rata masyarakat Kabupaten Ponorogo berada di bawah garis

---

<sup>11</sup> Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan sekumpulan beberapa Kelompok Tani (Poktan) yang menyatu dan saling bekerja sama dalam meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Sedangkan Kelompok Tani itu sendiri adalah kumpulan dari petani/peternak yang sengaja dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi pada lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) Permentan Nomor 6/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

<sup>12</sup> PNPM-Mandiri merupakan sebuah program dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang dituju serta bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

kemiskinan. Pelaksanaan PUAP di Ponorogo selama ini bukan berarti tidak ada kendala sama sekali. Di dalam implementasi program di lapangan, kendala-kendala tersebut pasti ada. Misalnya terdapat Gapoktan yang belum mampu mengembangkan program PUAP dengan baik dan ada juga Gapoktan yang justru menyelewengkan terhadap bantuan dana.

Pengawasan program PUAP kemudian diserahkan kepada Dinas Pertanian yang ada di provinsi maupun di kabupaten atau kota, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pertanian. Di dalam konteks ini program PUAP berada di bawah naungan (kontrol dan pengawasan) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Lebih spesifiknya bentuk pengawasan, pengontrolan dan pelaporan penggunaan program dana PUAP berada di bawah koordinasi oleh Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan program PUAP yang telah berjalan tentunya perlu diawasi dan dikontrol, apakah pelaksanaannya di lapangan sudah sesuai indikator yang dibuat atau belum dan memberikan dampak kepada para petani atau tidak. Maka untuk mengetahui hasil di lapangan itu seperti apa dan bagaimana, peneliti mengambil tempat penelitian di Sekretariat PUAP Kabupaten Ponorogo dan juga mengambil tempat yang ada di tiga desa dan kecamatan berbeda, yaitu di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak, Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman dan di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis.

Dengan demikian penelitian akan fokus kepada evaluasi pemberian dana bantuan PUAP kepada Gabungan Kelompok Tani serta melihat jalannya program PUAP hingga sekarang serta evaluasi dampak secara *outcome* dan hasil secara *output* yang dirasakan oleh para petani.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah biasa digunakan dalam penulisan ilmiah, yang bertujuan untuk mengerucutkan tujuan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Rumusan masalah adalah penjabaran dari hasil identifikasi peneliti serta batasan masalah yang ada. Maka dari itu rumusan masalah berupa pertanyaan lengkap dan terperinci yang mampu menjawab setengah pertanyaan dari masalah yang ada<sup>13</sup>. Maka berdasarkan pada uraian latar belakang yang menjelaskan tentang potensi pertanian dan kendala yang dihadapi berupa kemiskinan serta bantuan modal dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian, terdapat rumusan masalah. Beberapa di antaranya yaitu:

1. Bagaimanakah evaluasi implementasi kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah persoalan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Ponorogo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui evaluasi implementasi program PUAP di Kabupaten Ponorogo dan yang berada pada tiga desa tempat penelitian (Desa Nglumpang, Kecamatan Mlarak, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman dan Desa Tegalsari Kecamatan Jetis)
- b. Mengetahui segala bentuk persoalan dan permasalahan yang terjadi di lapangan ketika menerapkan kebijakan PUAP di masyarakat

---

<sup>13</sup> Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentunya adalah memberikan sumbangan terhadap dunia kelimuwan maupun kajian terhadap evaluasi kebijakan. Harapannya penelitian ini memberikan banyak manfaat kepada para mahasiswa, dosen atau kalangan akademisi, masyarakat serta dinas terkait maupun lembaga pemerintahan lain. Selain itu penelitian yang dilakukan ini setidaknya memberikan dua manfaat yang dapat diambil, baik dari segi teoritis dan praktis.

##### a. Segi Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menerapkan salah satu kajian mata kuliah prodi Ilmu Pemerintahan bidang “Kebijakan Publik” serta memberikan sumbangsih dan wawasan terhadap kelimuwan di salah satu kajian kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan pemerintah mengenai program PUAP di Ponorogo. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat akan manfaat yang bisa didapatkan dari suatu kebijakan yang dijalankan, serta dapat memberikan saran atau pun masukan dan kritik yang membangun terhadap kinerja program yang sedang berjalan.

##### b. Segi Praktis

Adapun manfaat dari segi praktis yaitu memberikan manfaat kepada penulis atau peneliti untuk dapat menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh sewaktu masih kuliah yaitu mata kuliah “Kebijakan Publik”. Selain itu manfaat juga ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Gabungan Kelompok Tani bahwa penelitian yang dilakukan berguna untuk perbaikan atau rekomendasi dalam pengelolaan PUAP ke depannya.

## 1.5 Definisi Konseptual

Konseptualisasi mengacu kepada upaya dalam mengambil konstruk berfikir secara abstrak kemudian disempurnakan dengan cara menguraikan teori serta memberikan definisi konseptual. Konsep harus didefinisikan secara jelas dan tepat agar nantinya tidak terjadi kerancuan berfikir atau kesamaran. Definisi yang baik haruslah jelas dan tepat, tidak ada ambiguitas serta spesifik. Sedangkan pengertian dari definisi konseptual itu sendiri adalah definisi yang menggambarkan konsep melalui konsep lain atau pernyataan tentang ide dalam benak peneliti dalam menentukan kata-kata tertentu yang saling berkaitan dengan ide dan konsep lain<sup>14</sup>. Sedangkan definisi konseptual penelitian ini yaitu:

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu, kebijakan dan publik sendiri. Definisi kebijakan telah dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya adalah yang menyebutkan bahwa kebijakan itu suatu perilaku yang berulang-ulang dan tetap di dalam hubungannya dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah guna memecahkan permasalahan umum, seperti kemiskinan dan pengangguran atau peningkatan pendidikan<sup>15</sup>.

Kebijakan publik berkaitan erat dengan pemerintah selaku subyek yang membuat kebijakan. Elemen-elemen penting yang ada dalam kebijakan publik di antaranya adalah kebijakan publik itu berbentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik tidak cukup dimaknai sebagai wacana saja tapi harus diimplementasikan dalam bentuk nyata, kebijakan publik itu sudah

---

<sup>14</sup> Silalahi, Ulber, 2015, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 118

<sup>15</sup> Abidin, Said Zainal, 2016, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika

pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu serta kebijakan publik itu harus selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat secara umum<sup>16</sup>. Bukan untuk kepentingan pribadi atau pun golongan tertentu.

Kebijakan publik itu sangat penting di dalam mengatur kehidupan seluruh kegiatan-kegiatan dari pemerintah baik individu dan kelompok berdasar aturan yang berlaku. Kebijakan publik melibatkan semua sektor yaitu formulasi dan implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat berupa peraturan untuk mengatur kegiatan pemerintah agar dapat bermanfaat kepada semua elemen masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, dimensi kebijakan publik menjadi suatu kajian studi keilmuan tersendiri. Studi ini mencakup agenda kebijakan, formulasi dan evaluasi. Oleh karenanya kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah jawaban dari adanya suatu masalah yang muncul di tengah masyarakat, dan memiliki tujuan untuk memecahkannya, atau mengurangi bahkan mencegah masalah dengan tindakan yang terarah.

Dari uraian beberapa pengertian tersebut dapat kita maknai bahwasanya program PUAP ialah kebijakan dari Kementerian Pertanian yang ada karena faktor kemiskinan yang melanda masyarakat petani sehingga menyulitkan para petani untuk mendapatkan modal usaha. Kebijakan ini merupakan solusi untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan usaha agribisnis lainnya, termasuk di dalam pemberian modal dan juga untuk menguatkan kelembagaan petani. Nantinya kebijakan ini diproyeksikan agar petani memiliki lembaga keuangan mikro yang dikelola sendiri untuk kepentingan pengembangan agribisnis.

---

<sup>16</sup> Syahrudin, 2009, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Karawang*, Tesis. FISIP Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tahapan dimana suatu kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut kemudian diterapkan di lapangan kepada objek sasaran. Implementasi memiliki arti kepada sebuah program yang pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap sesuatu khususnya adalah objek yang dituju. Sehingga dengan begitu kita dapat mengartikannya dengan serangkaian proses untuk melaksanakan keputusan dari pemerintah baik yang berbentuk peraturan pemerintah, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan daerah, dan bahkan peraturan desa<sup>17</sup>.

Proses dari implementasi kebijakan dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang telah dibuat dapat diperinci, program dirancang dengan dana atau biaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Perincian tujuan kebijakan yang telah disebutkan sangat dipengaruhi dari isi kebijakan dan bagaimana caranya mengimplementasikannya.

Implementasi kebijakan di sini adalah bagaimana menerapkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di masyarakat, atau ke Gabungan Kelompok Tani yang ada di seluruh Indonesia. Implementasi program PUAP kemudian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan dalam meneruskan program yang telah ada sebelumnya. Di akhir proses implementasi PUAP, keseluruhan hasil kebijakan program PUAP nantinya dapat dievaluasi dengan mengukur dan membandingkan antara hasil program dengan tujuannya. Apakah sudah sesuai dengan kriteria seperti dimaksud atau tidak.

---

<sup>17</sup> Leijiu, Agustinus, Masjaya dan Bambang Irawan, 2014, *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*, Jurnal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 4 Desember 2014

Proses implementasi di lapangan tentunya juga mengalami kendala atau pun hambatan. Kendala yang ditemui tersebut tidak terlepas dari permasalahan politik, masalah dasar ekonomi, lingkungan institusi yang lemah, SDM yang tidak mampu mengelola bidang teknis dan administratif, kurangnya bantuan di teknis, desentralisasi dan partisipasi yang kurang, serta kurangnya waktu. Begitu juga terdapat sistem informasi yang tidak mendukung, ada perbedaan agenda dan tujuan antar aktor dan dukungan yang kurang bersinambungan.

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan tidak hanya berdasarkan atas prinsip ekonomis, efisiensi maupun administratif. Akan tetapi juga harus berdasarkan atas etika dan moral yang berlaku. Etika berbicara tentang kenapa harus bertindak sedemikian rupa, sedangkan untuk moral lebih membicarakan bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat untuk bertindak<sup>18</sup>.

Secara garis besar pengertian dari implementasi kebijakan dapat diperinci dengan tiga pengertian pokok, yaitu bahwa kebijakan memiliki tujuan maupun sasaran, terdapat aktivitas dan juga adanya suatu hasil dari pada implementasi. Tahapan implementasi menjadi begitu penting dan sebuah keharusan untuk dilaksanakan, karena melalui kegiatan inilah suatu permasalahan publik bisa diselesaikan atau tidak. Hingga akan memunculkan penilaian-penilaian dan catatan kegagalan program untuk diperbaiki.

### 3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Proses terakhir dari studi kebijakan publik adalah evaluasi implementasi. Sebelum mencapai tahap ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui lebih dahulu. Mulai dari proses *agenda-setting*, formulasi kebijakan, implementasi

---

<sup>18</sup> Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia)

kebijakan dan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk menilai kebijakan atau program yang sedang dijalankan atau telah usai diimplementasikan. Kegiatan ini digunakan untuk tujuan mengukur kebijakan yang diimplementasikan tersebut berhasil atau mengalami kegagalan. Sehingga dari situ nantinya akan diperoleh suatu masukan dan rekomendasi apakah kebijakan dapat diteruskan, dilakukan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu atau bahkan diberhentikan sama sekali karena alasan tertentu.<sup>19</sup>

Evaluasi implementasi kebijakan berguna pula di dalam menyelaraskan antara teori evaluasi kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Apakah kebijakan yang diterapkan tersebut memberi dampak terhadap objek penerima kebijakan atau tidak. Evaluasi implementasi ini dapat diukur pula melalui evaluasi dampak serta evaluasi hasil<sup>20</sup>. Dari sini kemudian nanti dapat dilihat manfaatnya benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien atau berdampak luas kepada masyarakat atau tidak. Dengan kata lain evaluasi adalah proses dimana suatu kebijakan diberi nilai terhadap kelayakan di lapangan.

Pada umumnya evaluasi kebijakan yang dilakukan itu berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang apa bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, memberi penilaian terhadap keseluruhan target yang telah ditetapkan bersama dengan semua permasalahan yang ada ditemui di lapangan serta memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan lainnya. Setelah itu ada kesimpulan akhir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ke depannya.

---

<sup>19</sup> Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Terj. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman PUAP T.A 2015

Indikator evaluasi berbeda-beda karena dari situ akan terlihat apakah kebijakan berhasil atau tidak. Penelitian tentang evaluasi memiliki dua jenis fokus bahasan, penelitian evaluasi segi formatif yang menekankan pada proses dan evaluasi sumatif yang mengarah kepada segi hasil atau produk. Perbedaan keduanya terletak pada evaluasi formatif yang lebih condong kepada timbal balik dari proses implementasi, sehingga bisa digunakan dalam meningkatkan program (kebijakan). Sedangkan evaluasi sumatif condong kepada efektivitas pencapaian program kebijakan berupa produk tertentu<sup>21</sup>.

Evaluasi penelitian ini nantinya akan mengukur tingkat keberhasilan secara *output* dan *outcome* dengan beberapa indikator yang sudah dibuat. Adapun evaluasi *output* atau hasil adalah mengukur apakah PUAP sudah tersalurkan kepada para petani dan Gapoktan serta pelatihan SDM. Sedangkan evaluasi *outcome* (dampaknya) diukur melalui kemampuan dari Gapoktan mengelola bantuan, adanya peningkatan jumlah petani yang mendapat bantuan modal usaha PUAP, peningkatan aktifitas usaha agribisnis di desa serta peningkatan pendapatan petani dalam kegiatan usaha tani.<sup>22</sup>

#### 4. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan kebijakan dari Kementerian Pertanian, yang wewenanganya berada pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kebijakan PUAP berpedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Program ini

---

<sup>21</sup> Ikbar, Yanuar, 2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung: PT Refika Aditama

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman PUAP Tahun Anggaran 2015

dibuat untuk menangani permasalahan yang dialami oleh mayoritas petani yaitu berupa kemiskinan dan juga susahny mendapatkan modal untuk usaha. PUAP itu berada di bawah koordinasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan termasuk dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

PUAP itu ditujukan dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian atau agribisnis sesuai dengan potensi masing-masing desa setempat. Bantuan PUAP bersifat dana simpan pinjam yang dimana dalam sistem pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Setiap Gapoktan menerima dana awal sebesar Rp 100.000.000,- yang dikelola secara simpan pinjam yang dapat digunakan oleh anggota saja.

Program yang telah diimplementasikan ini sejatinya memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan petani dan pengangguran melalui usaha agribisnis perdesaan sesuai kondisi dan potensi wilayah di desa, memberi kemampuan sekaligus pengetahuan para pelaku usaha, lembaga Gapoktan, pemberdayaan sekaligus meningkatkan fungsi dari kelembagaan pertanian dalam usaha dan perannya sebagai lembaga keuangan dalam pengelolaan modal petani.

PUAP diberikan kepada Gapoktan yang telah memenuhi unsur dan syarat (yang telah terverifikasi oleh dinas yang menangani bidang pertanian), yaitu harus memiliki kepengurusan dari Gapoktan yang aktif dan pengurus tidak boleh berasal dari aparat desa, melengkapi administrasi dokumen berupa Rencana Usaha Bersama, Rencana Usaha Anggota (RUA), maupun Rencana Usaha Kelompok. Bila dokumen tersebut tidak lengkap maka Gapoktan tidak akan bisa menerima bantuan dana PUAP.



## 1.6 Definisi Operasional

Manfaat dari adanya definisi operasional adalah memudahkan bagi peneliti dalam berkomunikasi atau menjelaskan indikator dalam evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian definisi operasional yaitu penentuan objek sehingga menjadi variabel yang dapat dianalisis dan diukur<sup>23</sup>. Definisi operasional sejatinya menjelaskan cara-cara yang telah dibuat oleh peneliti dalam menentukan variabel, sehingga sangat memungkinkan bagi peneliti lainnya untuk melakukan replikasi pengukuran yang sama atau justru mengembangkannya menjadi baik.

Beberapa indikator dalam penelitian evaluasi kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
  - a. Evaluasi hasil terhadap penyaluran bantuan dana program PUAP kepada Gabungan Kelompok Tani
  - b. Evaluasi dampak program PUAP terhadap jalannya produksi tani
2. Dampak program PUAP terhadap jalannya produksi usaha tani
  - a. Akses modal terhadap produksi pertanian
  - b. Kualitas hasil produksi pertanian
  - c. Kualitas hidup masyarakat tani
3. Hambatan pelaksanaan program PUAP
  - a. Ketersediaan anggaran
  - b. Kualitas Sumber Daya Manusia Gabungan Kelompok Tani
  - c. Relasi antar struktur organisasi pemerintah

---

<sup>23</sup> Indriantoro, Nur & Bambang Supomo, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

## 1.7 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam evaluasi kebijakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) kali ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus<sup>24</sup>. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman yang didasarkan atas tradisi akan metodologi penyelidikan yang berbeda dengan cara mengeksplorasi segala macam masalah sosial atau manusia. Peneliti akan memberikan gambaran evaluasi program PUAP yang secara kompleks dan holistik, menganalisa kata, melaporkan pandangan rinci dari para informan-informan yang telah ditentukan dan melakukan penelitian dalam lingkungan yang sebenarnya<sup>25</sup>.

Berdasar pendapat tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi oleh petani selama ini adalah keterbatasan modal usaha tani sehingga terbentuk kebijakan program PUAP untuk membantu kasus tersebut, kemudian setelah itu peneliti akan mengumpulkan data lapangan baik primer maupun sekunder, mengolah dan menganalisis data dan yang terakhir adalah melaporkannya secara tertulis.

Kegunaan dari metode deskriptif kualitatif di dalam mengevaluasi program PUAP ini adalah untuk menganalisa dan menggambarkan obyek PUAP secara fokus kepada satu hal saja, terperinci, mengerucut dan tidak melebar kemana-mana berdasarkan atas data-data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>24</sup> Pendekatan studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok maupun situasi (Emzir, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*, Jakarta: Raja Grafindo Persada)

<sup>25</sup> Ibid

penelitian. Selain itu penelitian kualitatif dipilih untuk meneliti PUAP sebabnya hakikat pertanyaan penelitian yang menggunakan ‘*bagaimana*’ dan atau ‘*apa*’, beserta topik yang diambil oleh peneliti -PUAP- menarik untuk diekplorasi serta hasil penelitian yang perlu disajikan dengan suatu sudut pandang yang mendetail tentang objek PUAP tersebut.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah bertempat di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Sekretariat PUAP Kabupaten Ponorogo dan Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak, Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman dan Desa Tegalsari Kecamatan Jetis. Lokasi tersebut merupakan tempat yang berbeda dan memang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya guna memperoleh data-data mengenai bentuk implementasi sekaligus evaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan beserta informasi lain yang dibutuhkan secara akurat, tepat dan efisien.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sebagai salah satu instrumen dalam penulisan ilmiah dibutuhkan oleh peneliti untuk membantu memberikan data. Subyek penelitian individu yang dimintai keterangan sebagai narasumber. Kriteria narasumber yaitu subyek yang mempunyai jabatan, kedudukan maupun pengaruh di dalam kehidupan masyarakat desa. Peneliti dengan sengaja menggunakan metode *purposive sampling*, karena peneliti telah memilih individu-individu tertentu tempat untuk meneliti perkembangan PUAP<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Creswell, John W, 2018, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terj. Ahmad Lintang Lazuardi

Berikut subyek penelitian yang telah ditetapkan :

- 1) Sekretaris PUAP Kabupaten Ponorogo (Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo)
- 2) Ketua dan Wakil Ketua Gapoktan Mitra Tani Desa Nglumpang
- 3) Sekretaris Gapoktan Manteb Abadi Desa Kepuhrubuh
- 4) Bendahara Gapoktan Ronggo Warsito Desa Tegalsari

d. Sumber Data

Sumber data sangatlah diperlukan ketika hendak melakukan penelitian, yaitu darimana suatu data penelitian itu dapat diperoleh. Tujuannya untuk mencari informasi dan mengumpulkan data yang valid kemudian diolah dan diinterpretasikan serta membuat kesimpulan di akhir. Data dibutuhkan sebagai bahan sekaligus bukti terhadap penelitian yang dilakukan, bahwa kegiatan ini tidak dilakukan dengan asal-asalan. Secara umum sumber data penelitian terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer dicirikan sebagai data yang diambil dari lapangan secara langsung maupun diambil dari sumber pertama, sebagaimana pendapat Silalahi yang mengungkapkan bahwas sumber data primer ini merupakan objek atau dokumen orisinal asli (mentah) dari para pelaku narasumber atau disebut juga *first-hand information*<sup>27</sup>. Adapun data primer ini meliputi wawancara dengan Sekretaris PUAP Kabupaten

---

<sup>27</sup> Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 289

Ponorogo, Wakil Ketua Gapoktan Mitra Tani, Sekretaris Gapoktan Manteb Abadi serta Bendahara Gapoktan Ronggo Warsito.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan data primer. Sumber data jenis ini adalah kebalikan dari sumber primer. Perbedaan tersebut terletak pada data sekunder yang dikumpulkan berasal dari tangan kedua atau *second-hand information* maupun sumber lainnya<sup>28</sup>.

Peneliti mengambil data berupa jurnal dan skripsi juga internet serta dokumen dari Gapoktan seperti laporan tahunan, AD/ART Gapoktan, Peraturan Khusus Peminjaman dan Pakta Inegritas. Di samping itu data penelitian ini didapatkan dari dokumen Peraturan Menteri, dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan yang wajib dilakukan dalam menghimpun data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik dalam pengumpulan data harus dipilih secara tepat karena berguna dalam pemecahan masalah secara valid dan obyektif. Alur yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini merujuk pada pendapat Creswell yaitu *pertama*, menentukan individu atau tempat pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo serta Gabungan Kelompok Tani, *kedua* memperoleh akses dan membangun hubungan dengan pegawai dinas dan juga para petani, *ketiga* sampling purposeful

---

<sup>28</sup> Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 289

yaitu dengan menentukan subyek penelitian dan informan, *keempat* mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder, *kelima* merekam informasi pengumpulan data di lapangan, *keenam* memecahkan persoalan di lapang berupa membuat kesimpulan deskriptif dan *ketujuh* menyimpan data secara *offline*<sup>29</sup>.

Data dihasilkan melalui metode wawancara kepada para narasumber, observasi ke lapangan, maupun analisa dokumentasi. Adapun rincian dari metode tersebut yaitu:

1) Observasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan, melihat proses jual beli pupuk di kios Gapoktan. Observasi dapat diartikan dengan kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian<sup>30</sup>. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa mengikuti kegiatan pencairan dan pelunasan dana PUAP pada salah satu Kelompok Tani. Bagaimana sebenarnya para petani itu mengelola dana PUAP.

Tujuan dilakukan metode observasi ini tidak lain adalah untuk mengetahui kenyataan secara langsung, gambaran objek di lapangan tanpa ditutupi atau dimanipulasi. Hasil data dan informasi dari metode observasi yaitu dana PUAP sudah dikembangkan oleh Gapoktan Mitra Tani, Manteb Abadi dan Ronggo Warsito dan juga dari pihak dinas itu

---

<sup>29</sup> Creswell, John W, 2018, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terj. Ahmad Lintang Lazuardi

<sup>30</sup> Amirudin, 2016, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu

sendiri telah memberikan pendampingan kepada Gapoktan dan telah melakukan usaha agribisnis lain selain usaha simpan-pinjam PUAP seperti jual pupuk dan obat-obat pertanian.

## 2) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang banyak digunakan oleh peneliti di dalam mengumpulkan data perkembangan program PUAP beserta informasi lain. Kelebihan dari wawancara ini adalah mudah dilakukan, namun kelemahannya adalah validitas data informasi perlu ditambahkan dengan dokumen lain serta ditinjau lagi kembali secara berulang-ulang.

Metode wawancara berusaha mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab pula menggunakan lisan. Sehingga agar informasi yang diberikan tidak lupa, peneliti menggunakan alat bantu seperti gawai untuk merekam aktivitas wawancara serta alat tulis beserta buku catatan. Wawancara ini dipilih untuk menghimpun data berupa pendapat, tanggapan, keyakinan, dan informasi lain.

Metode ini dilakukan secara terstruktur dan tertulis, artinya semua pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan PUAP yang akan ditanya dan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya pada *interview guide*. *Interview guide* merupakan acuan pedoman terhadap pertanyaan yang nanti dikembangkan ketika melakukan wawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai untuk melengkapi data penelitian PUAP adalah Sekretaris PUAP Kabupaten Ponorogo, Ketua beserta Wakil ketua Gabungan Kelompok Tani Mitra Tani Desa Nglumpang

Kecamatan Mlarak, Sekretaris Gabungan Kelompok Tani Manteb Abadi Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman sekaligus Bendahara Gabungan Kelompok Tani Ronggo Warsito Desa Tegalsari Kecamatan Siman.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dokumen dari Gabungan Kelompok Tani, foto-foto kegiatan jual beli pupuk di kios pertanian dan proses pencairan dana PUAP dari Gapktan kepada para petani. Kegiatan dokumentasi berfungsi untuk data pelengkap maupun pendukung data primer yang didapatkan. Dokumentasi ini nantinya lebih mengarah kepada analisa terhadap laporan tahunan pengelolaan dana PUAP oleh Gapoktan maupun peraturan perundang-undangan dari Kementerian Pertanian.

#### f. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang ada pada data. Analisa data dilakukan jika data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Metode ini bermanfaat dalam memberikan informasi sehingga data yang diolah menjadi mudah dipahami dan mudah untuk menemukan kesimpulan.

Peneliti menggunakan analisa berdasarkan pendapat Creswell dengan analisa data spiral melalui tahapan, di antaranya:

- 1) Mengorganisasi data yang sudah ada, langkah ini diawali dengan mengorganisir data bacaan internet, jurnal, dokumentasi, peraturan



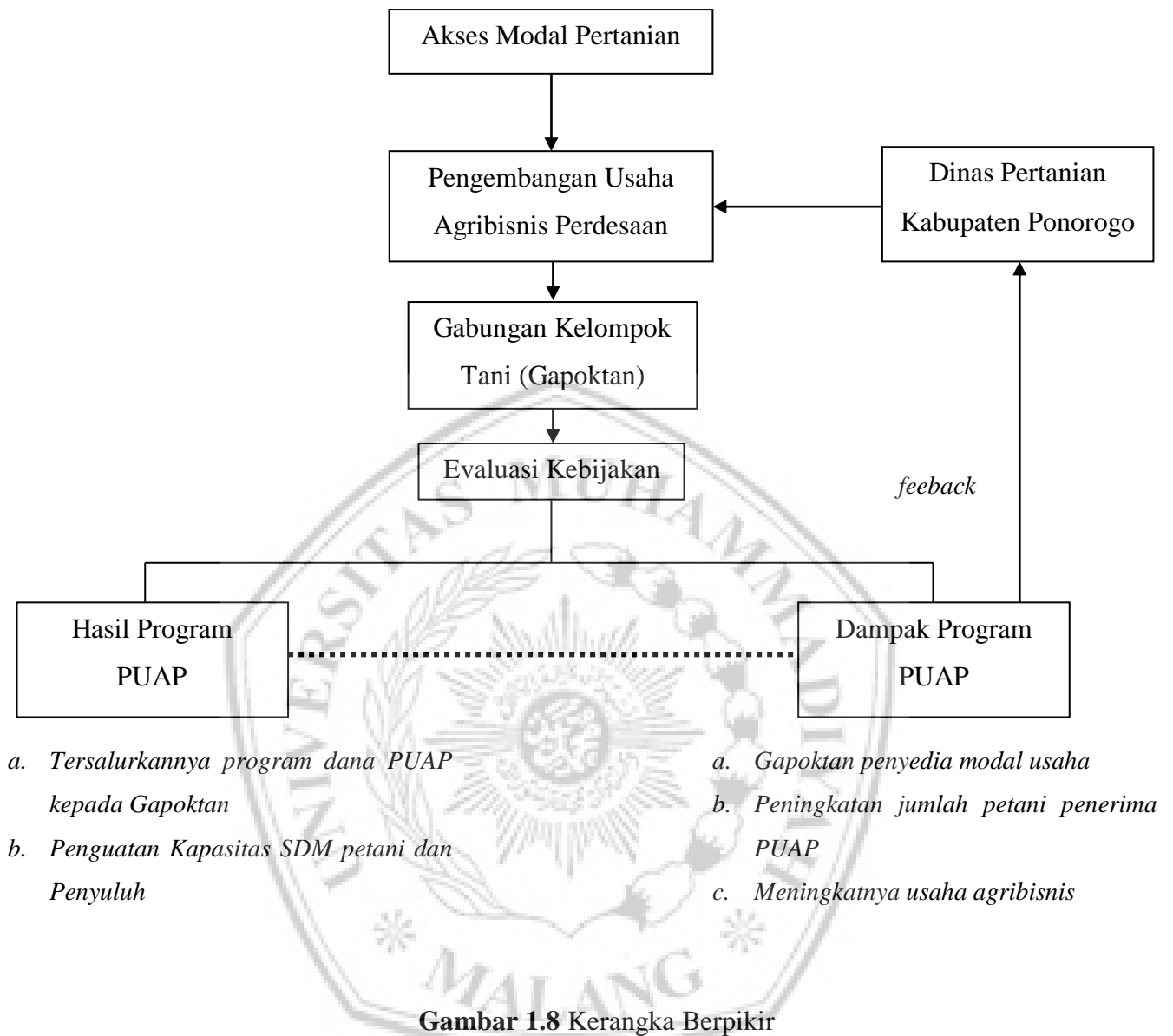
perundan-undangan dan hasil wawancara maupun observasi lapang tentang PUAP ke dalam komputer, kemudian dibuatkan *data base* agar mudah dicari kemudian hari.

- 2) Membaca dan membuat memo (*memoing*), proses yang kedua ini lebih diarahkan pada penekanan pembacaan ulang terhadap seluruh data PUAP yang telah didapatkan. Kemudian menuliskan catatan berupa memo yang berisi konsep, ide dan penilaian.
- 3) Mendeskripsikan, mengklasifikasi dan menafsirkan data menjadi kode dan tema, peneliti membuat deskripsi secara detail mengenai PUAP, mengembangkan tema atau dimensi, membuat klasifikasi dan menafsirkan data sesuai dengan sudut pandang dan perspektif peneliti. Sedangkan proses pengkodean (*coding*) dimulai dengan mengelompokkan data menjadi kategori informasi yang lebih kecil serta mencari bukti untuk kode tersebut dari *data base* yang sebelumnya. Dan untuk tema berupa informasi-informasi yang tersusun dari beberapa kode yang telah dikelompokkan dalam membentuk ide umum
- 4) Menyajikan dan memvisualisasi data, proses terakhir ini peneliti akan menyajikan dengan data PUAP yang telah diolah sebelumnya ke dalam teks (deskripsi serta narasi), tabel dan grafik serta gambar yang masih ada kaitannya dengan perkembangan PUAP<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Creswell, John W, 2018, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terj. Ahmad Lintang Lazuardi

### 1.8 Kerangka Berpikir



Salah satu permasalahan bidang pertanian di desa adalah kemiskinan para petani yang sulit mendapatkan modal untuk kegiatan usaha bertani. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu sebab mengapa program PUAP itu ada. Kabupaten Ponorogo termasuk salah satu daerah yang mendapatkan program. PUAP berupa bantuan modal dana Rp 100.000.000,- dan diberikan kepada setiap Gabungan Kelompok Tani untuk dikelola secara mandiri. PUAP digunakan untuk keperluan usaha simpan pinjam dan usaha bidang agribisnis lainnya.

Tujuan program selain untuk sumber akses permodalan, juga ditujukan untuk menguatkan kelembagaan keuangan petani di perdesaan, yaitu Gabungan Kelompok Tani. Gapoktan secara khusus didirikan oleh petani, oleh dari para petani dan untuk petani. Selanjutnya diharapkan PUAP juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengurus Gabungan Kelompok Tani untuk mengelola keuangan.

Setelah PUAP diterapkan maka perlu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi implementasi kebijakan, artinya adalah peneliti melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan di lapangan. Program ini adalah PUAP yang ada di Kabupaten Ponorogo. Evaluasi melihat dua sisi nilai yang berbeda, yaitu dari segi hasil program dan juga dampak program PUAP.

Hasil program PUAP berupa capaian tujuan yang berhasil dilaksanakan dan bentuknya dapat dilihat secara nyata. Berbeda halnya dengan evaluasi dampak program PUAP, untuk pengukuran dilakukan menggunakan cara kualitatif. Hasil dari program PUAP menilai apakah program bantuan dana PUAP telah diberikan secara keseluruhan kepada objek sasaran –Gapoktan- atau belum. Begitu juga ke arah penguatan kualitas SDM pengelola PUAP atau Gapoktan telah diberikan bentuk pelatihan apa belum.

Evaluasi dampak melihat adanya fungsi Gapoktan ada di lapangan, apakah sudah sesuai dengan indikator program atau belum, yaitu Gapoktan berkembang menjadi pengelola dana PUAP sekaligus penyedia jasa modal usaha. Kedua yaitu melihat apakah program PUAP telah dirasakan seluruhnya oleh para petani atau belum. Sedangkan untuk yang ketiga adalah apakah program PUAP telah dibuat untuk mengembangkan usaha agribisnis lainnya atau belum.